



**PENETAPAN**  
**Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**H. MUH. HUDRI, DRS, M.SI**, tempat dan tanggal lahir Pucue, 14 Mei 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, email: [muhhudri14@gmail.com](mailto:muhhudri14@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dicatatkan Permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 98/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311021405620001 tanggal 28 Februari 2020, tertera identitas pemohon yaitu H. Muh. Hudri, Drs, M.Si lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga orang pemohon Nomor : 7311022901056190 tanggal 15 Februari 2022, tertera identitas pemohon yaitu H. Muh. Hudri, Drs, M.Si lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 7311-LT-03122015-0051 tanggal 3 Desember 2015, tertera identitas pemohon yaitu MUH. HUDRI lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon tanggal 9 Desember 1974, tertera identitas pemohon yaitu MUH. HUDRI lahir di Pucue Tanete Rilau tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri pemohon tanggal 1 Oktober 1980, tertera identitas pemohon yaitu MUH. HUDRI lahir di Pucue Tanete Rilau tanggal 14 Mei 1962;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pemohon tanggal 2 Mei 1982, tertera identitas pemohon yaitu MUH. HUDRI lahir di Pucue umur 25 Tahun;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 91/II/1987 tanggal 27 Juli 1987, tertera identitas pemohon yaitu MUH. HUDRY lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa didalam Paspor Lama pemohon Nomor : B 3391145 tanggal 05 April 2016, tertera identitas pemohon yaitu MAHMUD DAUD HUDRI lahir di Barru tanggal 07 Juni 1963;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 400.10.2.2/097/Desa Garessi tanggal 15 Agustus 2024, dimana diterangkan bahwa antara identitas H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si yang lahir di Pucue, 14 Mei 1962 adalah merupakan orang yang sama dengan identitas MAHMUD DAUD HUDRI yang lahir di Barru, 07 Juni 1963;
- Bahwa identitas pemohon sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, yaitu H. Muh. Hudri, Drs, M.Si lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962 itu berbeda dengan identitas pemohon sebagaimana tertera didalam Paspor Lama pemohon yaitu MAHMUD DAUD HUDRI lahir di Barru tanggal 07 Juni 1963;
- Bahwa pemohon sudah pernah datang di Kantor Imigrasi Parepare untuk bermohon penerbitan Paspor Baru yang akan digunakan pemohon dalam menunaikan Ibadah Umroh pada H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si September tahun 2024, akan tetapi identitas pemohon yang digunakan pada saat penerbitan Paspor Lama tersebut, ternyata masih tersimpan pada database keimigrasian, sehingga permohonan pemohon waktu itu tidak ditindak lanjuti dan disarankan pemohon datang di Kantor Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penegasan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa oleh karena Paspor merupakan syarat dokumen perjalanan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh pemohon untuk menunaikan Ibadah Umroh, maka pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penegasan atau menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa atas perbedaan identitas pemohon tersebut diatas, pemohon sangat kesulitan dalam melakukan pengurusan terutama dalam pengajuan penerbitan Paspor Baru;
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah H. MUH. HUDRI, Drs,M.Si lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memudahkan pemohon dalam melakukan pengurusan penerbitan Paspor Baru yang akan digunakan pemohon dalam menunaikan ibadah Umroh;
- Bahwa atas permohonan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si lahir di Pucue tanggal 14 Mei 1962, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK 7311021405620001 tanggal 28 Februari 2020 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311022901056190 tanggal 15 Februari 2022;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XXIII Aa 034636 tanggal 9 Desember 1974, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri No. Daftar 3219/Pr/76-79/80 tanggal 1 Oktober 1980, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Nomor 06 OC oj 0016936 tanggal 2 Mei 1982, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 91/II/1987 tanggal 27 Juli 1987, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03122015-0051 tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor : B 3391145 tanggal 05 April 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311021405620001 tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7311022901056190 tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 400.10.2.2/097/Desa Garessi tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta bukti P-8 sesuai dengan scan barcode telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 berupa fotokopi dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irgi Fahreza bin Razidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Jl. Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran pada Paspor dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Buhaseng dan ibu atas nama I Beri Dg. Tumaning;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Sitti Syahria, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama pemohon dalam paspor tertulis Mahmud Daud Hudri;
- Bahwa nama yang tertera dalam dokumen kependudukan dan paspor merupakan orang yang sama;
- Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yakni Pucue pada tanggal 14 Mei 1962;
- Bahwa setahu saksi, paspor Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran karena Pemohon tidak memperhatikan dengan teliti identitas yang dicantumkan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data tanggal kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data pada Paspor dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan Paspor tersebut kepada Imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- 2. Saksi Irma Hajar binti H. Hajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Jl. Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran pada Paspor dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Buhaseng dan ibu atas nama I Beri Dg. Tumaning;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Sitti Syahria, S.Pd.;
  - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si;
  - Bahwa Saksi pernah melihat nama pemohon dalam paspor tertulis Mahmud Daud Hudri;
  - Bahwa nama yang tertera dalam dokumen kependudukan dan paspor merupakan orang yang sama;
  - Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yakni Pucue pada tanggal 14 Mei 1962;
  - Bahwa setahu saksi, paspor Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran karena Pemohon tidak memperhatikan dengan teliti identitas yang dicantumkan;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data tanggal kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data pada Paspor dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan Paspor tersebut kepada Imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa nama dan tanggal kelahiran pada paspor Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);  
Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;  
Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;  
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Irgi Fahreza bin Razidi dan Saksi Irma Hajar binti H. Hajaryang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:*

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-7 dan P-8, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Jl. Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeImigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan Saksi bernama Saksi Irgi Fahreza bin Razidi dan Saksi Irma Hajar binti H. Hajar menerangkan di persidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait



ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-5, Berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-8 berupa Kartu Keluarga membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setahu saksi penulisan nama dan Tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah H. Muh. Hudri, Drs, M.Si peristiwa kelahiran di Pucue tanggal 14 Mei 1962 dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor, Pemohon tidak mengecek ulang dokumen passpor, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon tercatat atas nama H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si lahir tanggal 14 Mei 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-9 Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 400.10.2.2/097/Desa Garessi tanggal 15 Agustus 2024 menunjukkan adanya pencocokan data pemohon sebagai warga desa garessi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa passpor, meskipun dokumen tersebut berupa fotokopi, namun bersesuaian dengan data para saksi diperoleh fakta bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon dalam paspor tertulis Mahmud Daud Hudri tanggal kelahiran 7 Juni 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas



diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk dokumen kependudukan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya tahun kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa nama dan peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah H. MUH. HUDRI, Drs, M.Si lahir tanggal 14 Mei 1962, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyalarsan nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama H. MUH. HUDRI Drs., M.Si., tempat tanggal lahir Pucue, 14 Mei 1962;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Minarti S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minarti S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

### Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNBP	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bar